



Manajemen Keuangan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Lembata

Katriela Mura^{1*}, Awan Sutrisno²

^{1,2}Politeknik Negeri Kupang

*E-mail korespondensi: murasesa03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi pariwisata Kabupaten Lembata yang besar namun belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan utama terletak pada keterbatasan alokasi dan realisasi anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurang optimalnya peran masyarakat dalam perencanaan strategis pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan daerah pada sektor pariwisata serta implikasinya terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen terhadap data APBD, laporan resmi pemerintah, serta literatur akademik periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pariwisata masih rendah (1,2 sampai 3 persen dari total belanja daerah) dan cenderung fluktuatif, sehingga tidak mampu mendukung program jangka panjang. Meski kontribusi PAD dari pariwisata relatif kecil, dampak ekonominya cukup signifikan melalui peningkatan UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta pelestarian budaya lokal. Kesimpulannya, tata kelola keuangan publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata Lembata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: anggaran daerah; Lembata; pariwisata berkelanjutan; partisipasi masyarakat; pengelolaan keuangan publik

Abstract

This study is motivated by the fact that Lembata Regency possesses vast tourism potential, yet its contribution to local revenue (PAD) remains limited. The main challenges lie in restricted budget allocation and realization, low human resource capacity, and the limited role of local communities in strategic tourism planning. The objective of this research is to analyze public financial management practices in the tourism sector and their implications for sustainable tourism development. A qualitative descriptive method was employed, using literature review and document analysis of regional budget reports, official government publications, and academic studies from 2020 to 2024. The findings reveal that tourism budget allocation remains low (1.2–3% of total regional expenditure) and fluctuates over time, hindering long-term development programs. Although tourism's contribution to local revenue is relatively small, its economic impact is significant through the growth of MSMEs, job creation, and cultural preservation. The study concludes that transparent, participatory, and locally based public financial governance is essential to realizing sustainable and competitive tourism development in Lembata.

Keywords: Budget allocation; Community participation; Lembata; Public financial management; Sustainable tourism



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kabupaten Lembata merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sumber daya alam yang unik. Keindahan alam Gunung Ile Ape, kekayaan laut yang potensial untuk wisata bahari, serta tradisi penangkapan ikan paus di Lamalera menjadikan Lembata sebagai destinasi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kurniadinata & Suhartini, 2024). Potensi ini menunjukkan bahwa Lembata memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi pariwisata yang tersedia dengan realisasi pengembangannya.

Salah satu kendala utama yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah lemahnya manajemen keuangan publik di tingkat daerah. Perencanaan anggaran yang belum matang, distribusi alokasi dana yang tidak merata, hingga lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi menyebabkan program-program pariwisata tidak berjalan secara optimal. Padahal, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan efektif merupakan kunci utama pembangunan berkelanjutan (Astuti et al., 2024). Brigham & Houston (2016) menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini tidak hanya berlaku pada sektor swasta, melainkan juga sangat relevan dalam konteks pemerintahan daerah. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari praktik *good governance*.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan penguatan identitas budaya lokal. United Nations World Tourism Organization (2025) menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pariwisata sekaligus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Satrio Wibowo & Arviana Belia, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan sektor pariwisata. Pengelolaan keuangan yang terstruktur dapat mendukung pembangunan infrastruktur penunjang, promosi wisata yang terarah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga kegiatan konservasi lingkungan (Hidayat & Rusnain, 2016; Suwena & Widyatmaja, 2020). Sebaliknya, lemahnya tata kelola keuangan publik berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti pemborosan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi, serta turunnya kepercayaan masyarakat dan investor (Shidqi & Arfiansyah, 2025).

Secara nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mendorong pengembangan destinasi wisata berkelanjutan melalui berbagai program prioritas (Ni Wayan Giri Adnyani, 2020). Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal manajemen keuangan dan pendanaan. Kondisi ini menimbulkan *research gap*, sebab sebagian besar studi terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada strategi pengembangan destinasi wisata, peran masyarakat, atau aspek lingkungan, sementara kajian mengenai keterkaitan langsung antara manajemen keuangan publik dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah kepulauan seperti Lembata masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan aspek manajemen keuangan daerah dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menelaah bagaimana tata kelola fiskal daerah, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memengaruhi arah dan efektivitas pembangunan pariwisata di Lembata.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana kondisi manajemen keuangan daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata? 2) Apa saja faktor penghambat efektivitas alokasi anggaran sektor pariwisata di Kabupaten Lembata? 3) Bagaimana strategi penguatan tata kelola keuangan publik untuk

mendukung pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lembata? Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis praktik manajemen keuangan daerah dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Lembata. 2) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam alokasi dan realisasi anggaran pariwisata. 3) Memberikan rekomendasi strategis terkait penguatan manajemen keuangan publik guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pengayaan kajian tentang manajemen keuangan publik di sektor pariwisata, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini dinilai tepat untuk menggambarkan fenomena sosial-ekonomi melalui data sekunder secara mendalam (Nugroho et al., 2020). Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan, khususnya dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD, serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata tahun 2020–2024. Selain itu, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi pemerintah juga digunakan sebagai sumber data untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode content analysis, yaitu menelaah isi dokumen dan literatur untuk menemukan pola, tema, serta hubungan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Astuti et al., 2024). Fokus utama analisis diarahkan pada besaran alokasi dan realisasi anggaran pariwisata, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, serta dampaknya terhadap indikator ekonomi lokal, seperti kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan UMKM. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan temuan berdasarkan data, menghubungkannya dengan teori maupun penelitian terdahulu, serta menafsirkannya dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suwena & Widyatmaja, 2020; Umasugi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran Pariwisata

Hasil analisis terhadap dokumen APBD Kabupaten Lembata periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pariwisata masih berada pada level yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 1,2%–3% dari total belanja daerah setiap tahunnya. Porsi ini jelas tidak sebanding dengan potensi pariwisata yang dimiliki, baik dari sisi alam, budaya, maupun sejarah. Secara rinci, alokasi terbesar justru masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan menuju destinasi wisata, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan seremonial berupa festival atau event budaya. Sementara itu, program strategis jangka panjang seperti pelatihan SDM pariwisata, pemberdayaan komunitas lokal, dan upaya pelestarian lingkungan hanya memperoleh porsi minimal atau bahkan nyaris tidak tersentuh.

Dari sisi realisasi belanja, kinerja pariwisata menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020–2021, realisasi belanja sektor pariwisata relatif stabil dengan capaian sekitar 85% dari total anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan akibat kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Kondisi ini memperlihatkan betapa pembangunan pariwisata sangat rentan terhadap guncangan fiskal dan tidak memiliki perlindungan anggaran (*budget protection*) yang kuat. Baru pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dalam realisasi belanja, meskipun capaian tersebut masih belum mampu menutupi stagnasi pembangunan sektor pariwisata selama dua tahun sebelumnya.

Minimnya alokasi dan fluktuasi realisasi anggaran tersebut memberikan implikasi yang cukup serius terhadap keberlanjutan pembangunan pariwisata di Lembata. Pertama, keterbatasan fiskal menyebabkan pembangunan pariwisata cenderung bersifat simbolis dan jangka pendek, lebih menonjolkan aktivitas seremonial yang bersifat insidental ketimbang pembangunan yang bersifat struktural. Kedua, alokasi anggaran yang tidak proporsional menyebabkan ketimpangan antara pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik, sehingga aspek pemberdayaan masyarakat serta konservasi lingkungan tidak terkelola secara optimal. Ketiga, fluktuasi realisasi anggaran memperlihatkan lemahnya konsistensi kebijakan fiskal, padahal konsistensi merupakan salah satu syarat utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Astuti et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Umasugi (2023) yang menegaskan bahwa di banyak daerah di kawasan timur Indonesia, sektor pariwisata belum mendapat prioritas fiskal yang memadai, sehingga pembangunan pariwisata masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini juga memperkuat temuan Shidqi & Arfiansyah (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola keuangan daerah berkontribusi pada rendahnya efektivitas pembangunan, termasuk di sektor pariwisata. Padahal, menurut Nugroho et al. (2020), manajemen keuangan publik merupakan instrumen strategis yang seharusnya digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan standar internasional, pola alokasi anggaran pariwisata di Lembata masih jauh dari prinsip *sustainable tourism* yang ditetapkan oleh UNWTO (2018). Dalam perspektif global, pengembangan pariwisata berkelanjutan seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan. Dengan demikian, kondisi Lembata menunjukkan adanya mismatch antara kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Secara konseptual, alokasi anggaran yang kecil dan realisasi yang tidak stabil dapat menghambat efek pengganda (*multiplier effect*) pariwisata terhadap perekonomian lokal. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya lokal. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan fiskal dan lemahnya tata kelola keuangan publik masih menjadi faktor penghambat utama dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lembata.



Tabel dan grafik mengenai alokasi serta realisasi anggaran pariwisata Kabupaten Lembata tahun 2020–2024 menunjukkan adanya pola yang konsisten dengan temuan analisis dokumen APBD. Secara umum, alokasi anggaran pariwisata rata-rata hanya berkisar antara 1,5%–2,8% dari total APBD, dengan tren yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 dan 2021, alokasi anggaran relatif lebih tinggi (2,5%–2,8%), dengan realisasi yang juga cukup baik, yakni mencapai 2,1%–2,4%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam baik pada alokasi maupun realisasi anggaran, masing-masing hanya 1,5% dan 1,0%. Hal ini sejalan dengan kebijakan *refocusing* anggaran daerah akibat pandemi COVID-19, yang memaksa pemerintah daerah mengalihkan sebagian besar belanja publik ke sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Pada tahun 2023 dan 2024, terdapat peningkatan kembali, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi. Realisasi anggaran tahun 2023 hanya mencapai 1,7% dan meningkat menjadi 2,3% pada tahun 2024. Meski ada perbaikan, capaian ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Visualisasi ini mempertegas bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Lembata masih sangat bergantung pada kapasitas fiskal yang terbatas dan rentan terhadap dinamika eksternal, baik pandemi maupun tekanan fiskal daerah lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, termasuk diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan publik-swasta, optimalisasi Dana Desa, maupun digitalisasi pengelolaan anggaran agar belanja pariwisata lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Di Kabupaten Lembata, hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif dalam keterlibatan masyarakat, terutama melalui pengelolaan wisata budaya berbasis kearifan lokal. Contoh paling menonjol adalah keterlibatan komunitas adat Lamalera dalam mempertahankan dan mempromosikan tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional, yang kini menjadi ikon wisata budaya Lembata. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi melalui kunjungan wisatawan, tetapi juga sarat makna sosial dan spiritual, sehingga menjadi bukti nyata peran komunitas dalam menjaga identitas budaya.

Selain itu, berkembangnya UMKM berbasis pariwisata seperti homestay, kuliner lokal, kerajinan tangan, hingga jasa transportasi dan pemandu wisata menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan pariwisata. Data BPS (2023) memperlihatkan bahwa sejak 2021 jumlah UMKM pariwisata di Lembata terus meningkat seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan domestik pasca-pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Namun demikian, partisipasi masyarakat di Lembata masih memiliki keterbatasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lebih banyak terjadi pada level teknis operasional, seperti penyediaan jasa wisata atau pengelolaan destinasi, sementara pada tahap strategis seperti perencanaan anggaran (*budgeting*) dan pengambilan keputusan pembangunan pariwisata, peran masyarakat masih sangat minim. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kebijakan, di mana program pariwisata yang dirancang pemerintah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Suwena & Widyatmaja (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan di Indonesia sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi komunitas. Jika masyarakat hanya dilibatkan sebagai pelaksana teknis, maka keberlanjutan jangka panjang sulit dicapai. Sebaliknya, jika masyarakat diberikan ruang dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi, maka mereka akan memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang kuat terhadap pariwisata.

Dalam konteks teori pembangunan berkelanjutan, UNWTO (2018) menekankan bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran pariwisata di Lembata perlu segera ditangani. Pemerintah daerah harus mendorong adanya mekanisme perencanaan partisipatif, misalnya dengan memperkuat forum *Musrenbang* atau membentuk lembaga pengelola destinasi yang inklusif, di mana masyarakat, pelaku wisata, akademisi, dan pemerintah dapat duduk bersama merumuskan arah pembangunan pariwisata.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Lembata telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan wisata budaya dan pengembangan UMKM, peran mereka masih sebatas aktor ekonomi, belum sepenuhnya sebagai aktor strategis dalam pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, perlu adanya transformasi peran masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi subjek utama pembangunan pariwisata.

Dampak Ekonomi Lokal dari Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Lembata memberikan kontribusi ekonomi yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 4–5% (BPS, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa pariwisata belum menjadi sektor unggulan dalam struktur fiskal daerah. Namun, di sisi lain, dampak tidak langsung atau multiplier effect pariwisata terhadap ekonomi lokal cukup signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas sirkulasi ekonomi di tingkat desa.

Pertumbuhan ekonomi lokal dapat terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis pariwisata sejak 2021, khususnya di sektor kuliner, kerajinan tangan, penyediaan transportasi lokal, dan homestay. Keberadaan wisatawan domestik yang meningkat pasca-pandemi mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menawarkan produk dan jasa wisata. Dampak ini selaras dengan temuan Kemenparekraf (2022) yang menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan dapat memperluas peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

Selain itu, pariwisata turut membuka lapangan pekerjaan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Pekerjaan langsung mencakup pemandu wisata, pengelola homestay, dan penyedia jasa transportasi, sementara pekerjaan tidak langsung mencakup produsen bahan baku, petani lokal yang memasok kebutuhan kuliner wisata, hingga pengrajin tradisional. Kondisi ini membuktikan bahwa pariwisata di Lembata berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa meskipun kontribusinya terhadap PAD belum optimal.

Namun demikian, dampak ekonomi pariwisata di Lembata masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, keterbatasan akses infrastruktur membuat beberapa destinasi

unggulan seperti Gunung Ile Ape dan desa wisata pesisir sulit dijangkau wisatawan. Kedua, kapasitas SDM lokal masih terbatas, baik dalam aspek manajemen usaha maupun kualitas pelayanan, sehingga membatasi daya saing dengan destinasi lain di NTT. Ketiga, strategi promosi wisata masih bersifat parsial dan kurang terintegrasi, sehingga Lembata belum banyak dikenal di pasar wisata nasional maupun internasional. Keempat, terdapat ketimpangan pembangunan di mana destinasi tertentu seperti Lamalera lebih berkembang, sementara desa wisata lainnya kurang tersentuh program pengembangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi: meskipun pariwisata mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM dan penciptaan lapangan kerja, keterbatasan infrastruktur, SDM, dan promosi menyebabkan potensi multiplier effect belum sepenuhnya dimaksimalkan. Temuan ini sejalan dengan studi Umasugi (2023) yang menyebutkan bahwa daerah di kawasan timur Indonesia sering menghadapi kendala struktural dalam mengoptimalkan potensi pariwisata karena lemahnya dukungan fiskal dan manajemen destinasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pariwisata di Kabupaten Lembata memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi lokal, meskipun kontribusi fiskalnya masih rendah. Untuk meningkatkan manfaat ekonomi jangka panjang, diperlukan strategi yang lebih terarah, seperti peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas SDM, serta promosi terpadu berbasis potensi lokal. Upaya ini akan memperluas dampak ekonomi pariwisata sekaligus memperkuat posisi Lembata sebagai destinasi berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.



Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lembata masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial. Pertama, keterbatasan alokasi anggaran menjadi kendala utama. Data APBD menunjukkan anggaran pariwisata hanya sekitar 1,2–3% dari total belanja daerah, dengan porsi terbesar dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan seremonial. Kondisi ini membuat program strategis seperti pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan SDM kurang mendapat perhatian (Astuti et al., 2024).

Kedua, terdapat masalah kualitas infrastruktur pendukung. Banyak akses menuju destinasi wisata masih sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi darat maupun laut. Hal ini mengurangi daya tarik wisatawan dan memperlambat distribusi manfaat ekonomi ke wilayah pedesaan.

Ketiga, kapasitas SDM lokal masih terbatas. Banyak pelaku pariwisata belum memiliki keterampilan manajerial, pemasaran digital, maupun kemampuan pelayanan wisata yang sesuai standar internasional. Kondisi ini membatasi daya saing pariwisata Lembata dibandingkan daerah lain di NTT seperti Labuan Bajo.

Keempat, strategi promosi wisata belum terintegrasi secara optimal. Promosi masih bersifat parsial dan berbasis event seremonial, sehingga Lembata belum menempati posisi strategis di pasar wisata nasional maupun internasional.

Kelima, terdapat ketimpangan pembangunan destinasi. Destinasi unggulan seperti Lamalera memperoleh perhatian lebih besar, sementara destinasi potensial lain seperti Ile Ape atau desa wisata pesisir belum dikembangkan secara proporsional. Ketimpangan ini dapat menciptakan disparitas sosial-ekonomi antarwilayah dalam jangka panjang.

Menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan strategis: 1) Penguatan Perencanaan Partisipatif. Masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, dan akademisi harus dilibatkan dalam Musrenbang dan penyusunan RKA sektor pariwisata, sehingga program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. 2) Digitalisasi dan Transparansi Keuangan. Pemanfaatan aplikasi keuangan daerah dan dashboard publik akan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pariwisata, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan investor (Shidqi & Arfiansyah, 2025).

3) Kemitraan Investasi Publik-Swasta (PPP). Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta untuk investasi infrastruktur strategis, seperti pelabuhan wisata, homestay, pusat informasi pariwisata, dan fasilitas ekowisata. 4) Pemanfaatan Dana Desa untuk Pariwisata. Desa-desanya di Lembata dapat mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk mendukung pengembangan desa wisata, meliputi pelatihan, pengelolaan destinasi, dan promosi digital.

5) Peningkatan Kapasitas SDM. Aparatur daerah maupun pelaku UMKM wisata perlu diberikan pelatihan akuntansi, manajemen usaha, hospitality, serta promosi digital berbasis teknologi. 6) Monitoring Berbasis Kinerja. Diperlukan sistem evaluasi anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan hanya output, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pariwisata Lembata berada pada keterbatasan fiskal, infrastruktur, SDM, dan promosi, namun hal ini sekaligus membuka ruang bagi inovasi kebijakan. Jika pemerintah daerah mampu memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, inklusif, dan berbasis potensi lokal, maka pariwisata Lembata berpeluang menjadi sektor unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini masih terbatas pada analisis dokumen perencanaan dan data sekunder APBD, sehingga untuk memperdalam kajian ke depan diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan analisis keuangan dengan survei lapangan, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Penelitian tersebut dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai persepsi masyarakat, efektivitas kebijakan pariwisata, serta dampak sosial-budaya dan lingkungan dari pembangunan pariwisata di Kabupaten Lembata. Selain itu, studi komparatif antar-daerah di kawasan timur Indonesia juga penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik manajemen keuangan publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan nasional yang lebih kontekstual dan aplikatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata masih menghadapi keterbatasan signifikan dari sisi manajemen keuangan publik. Alokasi anggaran yang rendah dan fluktuatif menyebabkan pembangunan pariwisata cenderung bersifat jangka pendek dan seremonial, sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi daerah. Meskipun demikian, pariwisata terbukti memberikan dampak ekonomi yang penting melalui pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas budaya lokal. Namun, peran masyarakat masih dominan pada aspek operasional, belum terlibat secara strategis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tantangan utama meliputi keterbatasan fiskal, infrastruktur, kapasitas SDM, serta promosi yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal menjadi prasyarat utama untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan di Lembata.

REFERENSI

- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 174–185. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2016). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Hidayat, N., & Rusnain, A. M. (2016). Pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Katingan. *Pencerah Publik*, 3(1), 12–16. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v3i1.794>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Laporan kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Statistik kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022*. Jakarta: Kemenparekraf. <https://www.kemenpar.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-tahun-2022>
- Kurniadinata, W., & Suhartini, N. (2024). Sustainable tourism development strategy through the community-based tourism model at DTW Pesona Leuweung Oke, Cirapuhan Village, Garut District. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 146–157. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1119>

- Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, H. R. (2020). The planning and the development of the ecotourism and tourism village in Indonesia: A policy review. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i1.1163>
- Satrio Wibowo, M., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.36294/jmpp.v6i1.3957>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Suvena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2020). Sustainable tourism development and local community involvement in Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 564–573. <https://doi.org/10.30892/gtg.292spl05-531>
- Umasugi, M. (2023). Implementation of sustainable tourism in Eastern Indonesia: A study on Morotai Island. *International Journal of Academic and Applied Social Science*, 6(8), 155–162. <https://www.ijassjournal.com/2023/V6I8/4146663511.pdf>
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2018). *Tourism and the sustainable development goals – Journey to 2030*. Madrid: UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284419401>
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2025). *The importance of tourism for sustainable development*. UNWTO Academy. <https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/es/2021/09/the-importance-of-tourism-for-sustainable-development>